

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

2.1.1 Teori Federalism Fiskal

Didalam teori federalism fiskal menerangkan bahwa Desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya. Program pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik apabila ketersediaan anggaran di daerah mencukupi dan pengalokasian sesuai kebutuhan di setiap daerah.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan *output* dalam periode tertentu misalnya satu tahun, dengan kata lain juga pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur,

bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. (Lubis & Syarvina, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah. (Izza, Wachdah, & Yasin, 2023).

Pengertian ekonomi (Boediono, 2012) sebagai berikut:

“Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih)”

Berdasarkan beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi diatas, maka dapat di interpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi atau perekonomian dalam bentuk barang atau jasa untuk mendapatkan pendapatan di masyarakat dalam periode tertentu. (Lubis&Syarvina : Izza,Wachdah, & Yasin : Boediono).

2.1.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006), antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam

pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah akan menunjang dalam pembangunan.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas.

c. Akumulasi Modal

Faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil

teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal, dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

2.1.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Adisasmita, 2013) sebagai berikut :

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan ideal, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pegelompokkan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian,

dimana terjadinya kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis ekonomi *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai

kegiatan di sekto-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memebuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahanpenolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkut, pemasaran, perbankan, dan lainnya).

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indicator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut deffinisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan

yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga cara menghitung PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan produksi PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit tersebut dalam penyajian dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas, dan air bersih
5. Bangunan dan Konstruksi
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Jasa Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan, dan
9. Jasa-jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan komponen permintaan akhir, dari:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
2. Konsumsi pemerintah

3. Pembentukan modal tetap domestic bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
 4. Pembentukan stok
 5. Ekspor netto (ekspor dikutang impor)
- c. Pendekatan pendapatan PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasila dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor tersebut nilai tambah netto (NTB sectoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar

harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

2.1.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Macam-macam cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Suparmoko & Maria, 2000) diantaranya:

1. Produk Domestik Bruto

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Untuk suatu daerah diukur melalui PDRB (Produk Regional Domestik Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

$$Growth = \frac{PDRB_t - PDRB(t - 1)}{PDRB(t - 1)} \times 100\%$$

Growth : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB_t : PDRB riil tahun sekarang

PDRB_{t-1} : PDRB riil tahun lalu

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Bruto dengan didasarkan atas harga berlaku.

2. PDB Perkapita atau Pendapatan Perkapita

PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.

3. Pendapatan Perjam Kerja

Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

Ekonomi maju dan berkembang serta rakyat yang sejahtera menjadi cita-cita dari seluruh negara di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, negara melalui pemerintah dan jajarannya senantiasa mengoptimalkan indikator-indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski banyak indikator yang bias digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya yang menjadi tolak ukur adalah nilai PDB. Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negative mengidentifikasi bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu.

2.1.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. (Kurniawan, 2013).

Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi peilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah guna menambah aset kekayaan daerah, belanja modal digunakan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan sarana transportasi, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. (Ifa, 2017).

Salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilai relative material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relative material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambahkan aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

(Komite Standar Akuntansi Pemerintah (SKAP), 2006).

Untuk mengetahui belanja daerah yang di alokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang berjalan bisa dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi, Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, 2016).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

2.1.3.2 Macam-macam Belanja Modal

Macam-macam belanja modal (Peraturan menteri keuangan no 101/PKM.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, 2011) sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk perolehan dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap dipakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap dipakai.

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, penambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal

Sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006) bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004), pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi Umum pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.4 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

“semua hak dan kewajiban yang dapat yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki.dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-piahk lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. (Halim, 2007)

“kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”. (Halim, 2007)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah

pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. (Tolosang, 2018).

Berdasarkan hasil pengertian diatas, maka untuk mengetahui tingkat Kemandirian Keuangan daerah dapat dirumuskan (Mahmudi, 2010) sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Mengetahui kemandirian keuangan daerah ini dapat menunjukkan seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam menandai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut dapat diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011). Rasio kemandirian keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah

terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian dapat pula untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

2.1.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Tangkilisan, 2007: 89-92), antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah potensi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Renny Nur'ainy (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota di Jawa Barat)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2.	Krest D Tolosang (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.
3.	Tri Utari Handayani, Eritos (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating	Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4.	Erstelita Tria Ramadhanii Darwis (2009)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah. Belanja Pegawai berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5.	Afifah Fauziah Amalia N, Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Kurnia Rina Arini, Gustita Arnawati Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
7	Wulan Riyadi (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
8	Romana Leny Gaghana, Paulus Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu (2018)	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung,	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Tingkat

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu).	Kemandirian Keuangan Daerah.
9	Shinta Bella, Fitrah Sari, dan Ullya Rahmi Aswin (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
10	Eny Wahyuni, Lilis Ardini (2018)	Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh Negatif terhadap Tigkat Kemandirian Keuangan Daerah.
11	Rifaldy Rizky Hermawan, Solehudi (2023)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap

NO	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
12	Muhammad Yahya, Tituk Diah Widajantie (2023)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapata Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah. Belanja Modal Berpengaruh Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
13	Misra Sarumaha, Annisa (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian didukung oleh teori umum (*grand theory*) yaitu teori *fiscal federalism*. Teori *fiscal federalism* di dalamnya juga menjelaskan tentang

pemerintah daerah mampu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk keefesienan anggaran bisa berjalan baik dan dapat dicapai apabila anggaran pemerintah mampu menjalankan dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Teori selanjutnya digunakan adalah teori pengeluaran pemerintah. bahwa teori ini berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta, (Kasyati, 2015). Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah ekonomian melalui perencanaan, kebijakan pemerintah, dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan, (Putirani & Sri, 2011). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro. Teori pengeluaran pemerintah diantaranya adalah Teori Peacock dan Wiserman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun, masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Teori Peacock dan Wiserman , perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Karena itulah pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

Berdasarkan definisi teori diatas maka pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah dengan membayar pajak.

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Implikasi Pertumbuhan ekonomi dan teori *fiscal federalism* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila ada penambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Pendapatan inilah akan mempengaruhi sehingga pertumbuhan ekonomi secara positif, sehingga mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat yang dimana akan mempengaruhi kemandirian suatu daerah. (Eka, 2017).

Didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Nur'ainy, Desfitriana, & Utomo, 2013). Mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, Eritos 2020). Mengatakan bahwa dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi adapun hasil yang berbeda diantara penelitian oleh (Tolosang, 2018). Mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kemandirian keuangannya pun meningkat. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan peran yang besar berarti kemandirian keuangannya pun tidak akan tercapai.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penerapan teori *fiscal federalism* pada peran pemerintah harus mampu menunjang sarana dan prasarana yang memadai, agar masyarakat dapat menjalankan perekonomiannya dan menjalankan segala aktifitasnya yang berimbas pada peningkatan kemampuan mereka membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan, baik itu berupa pajak maupun retribusi.

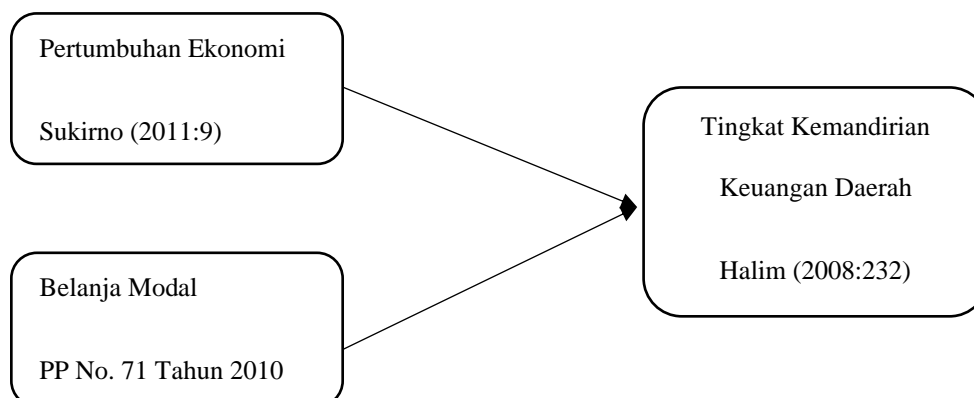
“Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah, yang juga secara tidak langsung akan

meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah”. (Harianto & Adi, 2007).

Didukung oleh penelitian terdahulu oleh Kurnia Rina Arini, Gustita Arnawati Putri (2016) Mengatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Riyadi (2022) Mengatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Tetapi adapun hasil yang berbeda yang dikemukakan oleh Muhammad Yahya, Tituk Diah Widajantie (2023) Mengatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah.

Maka dari itu jika belanja modalnya meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah pun dapat meningkat. Belanja modal ini mampu memberikan peran penting dalam meningkatkan keuangan daerah. Tetapi jika belanja modal tidak mampu memberikan andil yang besar berarti kemandirian keuangan daerahnya tidak dapat tercapai. Semakin besar belanja modal maka semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerahnya dapat dikatakan tercapai.

2.3.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2. 1 **Paradigma Penelitian**

2.4 Hipotesis Penelitian

Merupakan gambaran sementara terhadap rummusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang ada belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.